

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Prespektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemegang saham (principal). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing–masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi, akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat–cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar–besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Pemegang saham menilai kinerja manajer berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan laba perusahaan. Sebaliknya, manajer berusaha memenuhi tuntutan pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal agar mendapatkan kompensasi atau insentif yang diinginkan. Namun, manajer seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan kondisi perusahaan kepada pemegang saham agar tujuannya mendapatkan kompensasi dapat tercapai.

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan dari pada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi.

Asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal)

dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (Richardson, 1998). Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*selfinterest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*boundedrationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*riskaverse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku mementingkan diri sendiri dari seorang manajer yang dapat bertindak bebas untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Asimetri informasi antara agent dan principal dapat memicu manajer untuk melakukan disfunctional behavior. Adanya kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan maka manajemen mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan kepentingan mereka yang salah satunya dengan melakukan manajemen laba.

### 2.1.2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa

diberlakukan secara progresif, proporsional dan regresif. Pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atas seluruh penghasilannya (Jannah dan Mildawati, 2017). Menurut Mardiasmo (2011: 1), definisi atau pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada semua orang secara pribadi (person) dan perusahaan (sebagai subyek pajak) atas semua pendapatan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diperolehnya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Kegiatan tersebut meliputi bekerja, berproduksi, berinvestasi dan kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan atau menambah kemampuan ekonomi (Suratman, 2009).

### 2.1.3. *Good Coorporate Governance*

*Good Corpoorate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada *shareholders* pada khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. *Good Coorporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder.

Prinsip dasar *goodcorporate governance* meliputi empat aspek yang merupakan indikator yang pengelolaan pemerintahan yang baik, yaitu:

#### 1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan transparansi yang berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada

kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan resiko yang dihadapi perusahaan. Praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi adalah perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana atau kebijakan perusahaan (*corporate action*) yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada seluruh pihak mengenai struktur kepemilikan perusahaan, serta perubahan-perubahan yang terjadi.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajiban. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris, memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi. Pengungkapan komisaris independen merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian oleh pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.

## 3. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, Prinsip ini menekankan pada jaminan

perlindungan hak-hak para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktik kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktik kecurangan (*Fraud*) dan praktik-praktik insider trading.

#### 4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab, Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam corporate governance yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya. Responsibilitas juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan yang ada akan menghindarkan dari sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi moral masyarakat akibat dilanggarnya kepentingan mereka.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001:1) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Menurut *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD, 2015) tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk membantu perusahaan membangun kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mengembangkan investasi jangka panjang, stabilitas keuangan dan integritas bisnis, dengan mendukung pertumbuhan yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih inklusif. *Good corporate governance* melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, *stakeholder*, dan pemangku kepentingan lainnya. *Good corporate governance* memiliki struktur yang menjelaskan

bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan (Wahyono, 2012).

Mekanisme *good corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme internal dan external. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal (OECD, 2015). *Good corporate governance* merupakan sarana untuk mendukung efisiensi ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan perusahaan. Adanya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan akan membantu memfasilitasi perusahaan ke modal investasi jangka panjang, dan membantu memastikan bahwa para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lain yang ikut berkontribusi dalam keberhasilan perusahaan telah diperlakukan secara adil (OECD, 2015).

*Corporate Governance Perception Index (CGPI)* merupakan sebuah hasil riset yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* bekerjasama dengan majalah SWA untuk mengukur tingkat *Corporate Governance* yang diterapkan perusahaan Indonesia. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2001 dilandasi pemikiran pentingnya sejauh mana perusahaan-perusahaan publik telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Keikutsertaan program ini bersifat sukarela. Tujuan program CGPI adalah untuk merangsang perusahaan agar berlomba-lomba menerapkan *good corporate governance* demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Hasil dari riset yang dilakukan oleh IICG, *index corporate governance* yang diurutkan berdasarkan peringkat. Pengukuran variable CGPI berdasarkan jumlah nilai akhir dari setiap tahapan penilaian dalam bentuk presentase.

#### 2.1.4. *Leverage*

*Leverage* adalah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai asetnya dalam rangka untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya karena kreditor jangka panjang akan menghadapi resiko yang lebih besar dalam penyelesaian hutang. Salah satu cara untuk mengukur *leverage* adalah dengan menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu untuk mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan (Manurung dan Isnwardhana, 2017).

*Leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. *Leverage* diukur dengan cara perbandingan total utang dengan total aset. Perusahaan yang memiliki utang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian utang jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki utang lebih kecil (Mardiah, 2017). Apabila, semakin besar kewajiban yang menjadikan manajemen perusahaan menjadi sulit dalam membuat prediksi jalannya perusahaan ke depan. Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi berbagai kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat bunga, dan negosiasi ulang masa utang menurut (Herawaty dan Baridwan 2007). Penelitian yang menghubungkan utang dengan manajemen laba biasanya menggunakan proksi *leverage* (Widyaningdyah, 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba, serta untuk mengetahui bagaimana peranan *corporate governance* dalam meminimalkan praktik manajemen laba.

#### 2.1.5. Manajemen Laba

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam menentukan laba dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (Manurung dan Isnwardhana, 2017). Manajemen laba merupakan suatu proses yang disengaja,

menurut batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu (Santana dan Wirakusuma 2016).

Manajemen laba juga suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan–pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2004). Definisi manajemen laba juga dikemukakan oleh Belkaoui (2004) yang melihat manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Scott (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer mempunyai perilaku *opportunistic* dalam mengelola perusahaan. Manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif–alternatif yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Scott (2006) membagi pola manajemen laba menjadi empat:

1. *Taking abath*

Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang

2. *Incomemaximization*

Manajer perusahaan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan mendapatkan bonus. *Income maximization* dilakukan saat perusahaan mengalami penurunan laba.

3. *Incomesmoothing*

*Income smoothing* merupakan salah satu pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara meratakan perolehan laba yang perusahaan sehingga laba yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi. Chariri dan Ghazali (2007) menyatakan dua alasan yang digunakan manajemen untuk melakukan *income smoothing*. Alasan pertama didasarkan pada asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat



mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang berfluktuasi. Kedua, berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik. Teknik dan pola manajemen laba menurut Rahmawati dan Qomariyah (2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

- a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

- b. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

- c. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai. Motivasi yang melatar belakangi terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer, antara lain:

1. Bonus Purposes Manajer yang lebih mengetahui informasi tentang laba perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham cenderung bersifat mementingkan diri sendiri dan melakukan tindakan manajemen laba untuk memaksimalkan laba saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan insentif berupa bonus.
2. Political Motivations Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. *Taxation Motivations* dilakukan perusahaan dengan tujuan penghematan pajak. Manajemen laba dilakukan untuk memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya.
4. Pergantian CEO Manajemen laba yang dilakukan oleh CEO yang telah mendekati masa pensiunnya biasanya dilakukan dengan menaikkan laba dengan tujuan mendapatkan bonus.
5. *Initial Public Offering (IPO)* Perusahaan yang baru pertama kali melakukan penawaran sahamnya dan belum memiliki nilai pasar memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan di masa yang akan datang.
6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor Segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan harus disampaikan oleh manajer kepada investor sebagai bentuk tanggungjawab manajer. Oleh karena itu, pelaporan laba perlu dibuat sedemikian rupa sehingga investor tetap menilai bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sesuai keinginan.

Menurut Watt dan Zimmerman (2009) dalam *positive accounting theory* terdapat tiga hipotesis yang melatar belakangi terjadinya manajemen laba, yaitu :

1. *The bonus plan hypothesis*

Manajer perusahaan memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* yang lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan. Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah bogey, tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di atas cap, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan

memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba berada di atas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada di antara bogey dan cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.

## 2. *The debt covenanthypothesis*

Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

## 3. *The politcal costhypothesis*

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

Menurut Scott beberapa motivasi manajemen laba yang mendorong manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

### 1. Motivasi Bonus

Yaitu manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

### 2. Motivasi Kontraktual Lainnya

Yaitu manajer suatu perusahaan yang memiliki rasio *debt/equity* yang besar cenderung akan memilih prosedur-prosedur akuntansi yang dapat memindahkan periode mendatang ke periode berjalan. Manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian hutangnya.

### 3. Motivasi Politik

Yaitu manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan politik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena

adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan lebih ketat.

#### 4. Motivasi Pajak

Menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi labanya yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

#### 5. Pergantian CEO

Yaitu motivasi manajemen laba ada di sekitar waktu pergantian CEO. Biasanya CEO yang akan pensiun atau masa kontraknya menjelang berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya adalah menghindari diri dari pemecatan sehingga mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan.

#### 6. Motivasi Pasar Modal

Motivasi ini muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh investor dan para analisis keuangan untuk menilai saham. Dengan demikian, kondisi ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi laba dengan cara mempengaruhi performa harga saham jangka pendek.

## 2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yang dilakukan pada penelitian sebelumnya.

*Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu*

No	Nama dan Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Halimi (2017) X1:Pajak Penghasilan	Uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas,	Menunjukkan bahwa pajak penghasilan tidak berpengaruh pada manajemen laba, artinya

	X2: <i>Corporate Governance</i> Y : Manajemen Laba	autokorelasi dan analisis regresi linear berganda.	tidak adanya hubungan antara pajak penghasilan dengan manajemen laba. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh negatif pada manajemen laba, Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
2	Susilawati dan Purwanto X1 : <i>Good corporate governance (GCG)</i> X2 : <i>Leverage</i> X3 : Ukuran Perusahaan Y : Manajemen Laba	Teknik analisis data regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variable control.	Menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, tetapi ukuran komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara simultan kelima variable tersebut tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3	Dewi dan Wirawati X1 : <i>Leverage</i> Y : Manajemen Laba Z : <i>Corporate Governance</i>	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .	Bahwa <i>leverage</i> berpengaruh negatif pada manajemen laba. Penelitian ini juga menemukan bahwa <i>Corporate Governance</i> mampu memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap manajemen laba.
4	Murti (2017) X1 :	Metode analisis	Menunjukkan mekanisme

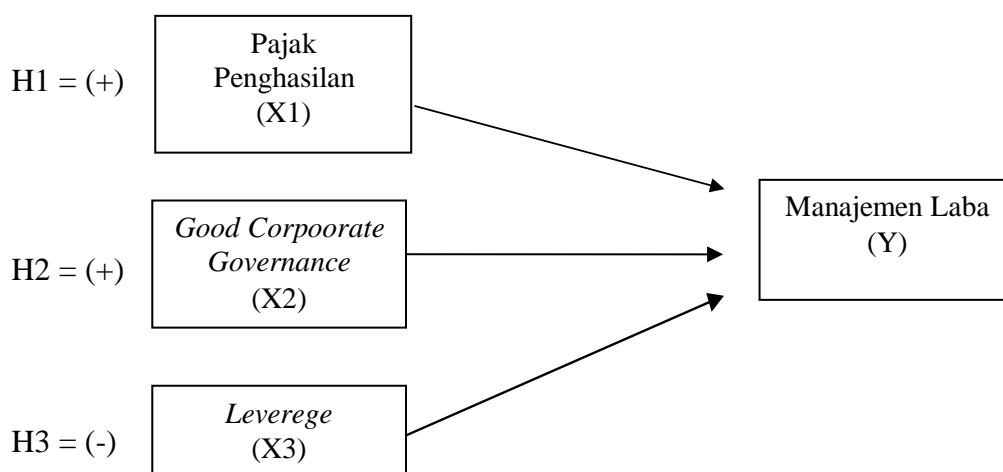
	<p><i>Corporate Governance</i></p> <p>X2 : Ukuran Perusahaan</p> <p>X3 : <i>Leverage</i></p> <p>Y : Manajemen Laba</p>	<p>data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.</p>	<p><i>corporate governance</i> yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisarisindependen, komite audit, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dilihat dari nilai <math>t</math> hitung <math>&gt;</math> <math>t</math> tabel dan probabilitas <math>&gt;0,05</math>.</p>
5	<p>Agustia (2013)</p> <p>X1 : Faktor <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>X2 : Free Chas Flow</p> <p>X3 : <i>Leverage</i></p> <p>Y : Manajemen Laba</p>	<p>Data dianalisis menggunakan regresi berganda.</p>	<p>Bahwa semua komponen <i>good corporate governance</i> (ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan menejerial) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan leverage berpengaruh, free cash flow berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba.</p>
6	<p>ana dan Herawati (2010)</p> <p>X1 : Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa</p>	<p>Menunjukkan bahwa <i>laverage</i>, kualitas audit, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba. Ini berarti bahwa <i>laverage</i>,</p>

	X2 : Independensi Auditor X3 : Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Y : Manajemen Laba	Efek Indonesia, dipilih menggunakan metode purposive sampling, selama periode 2006-2008. Data dianalisis menggunakan metode regresi berganda.	kualitas audit oleh ukuran perusahaan audit dan laba atau rugi yang dilaporkan oleh manajemen akan memotivasi manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba.
--	---	---	---

### 2.3. Model Konseptual Penelitian

Untuk lebih jelasnya pengaruh antara variabel independen dengan variable dependen dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka  
Pemikiran



### 2.4. Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1. Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap Manajemen Laba

Peningkatan pajak penghasilan akan menurunkan praktik manajemen laba, dikarenakan pajak merupakan hal paling menonjol yang dilakukan perusahaan dalam memberikan sumbangan terhadap pemerintah. Jika pajak perusahaan tinggi otomatis profitabilitas juga tinggi. Jika profitabilitas perusahaan tinggi maka perusahaan yang bersangkutan akan lebih dimonitori atau dipantau oleh para investor dan pemerintah. Oleh karena itu, manajemen dalam hal ini akan menurunkan praktek manajemen laba, karena untuk menghindari *political cost*. Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis seperti pajak, regulasi, subsidi pemerintah, tarif, antitrust, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Jika perusahaan melakukan manajemen laba dan diketahui oleh para investor dan pemerintah, manajemen akan mengeluarkan biaya politik yang bisa mengurangi laba dan kredibilitas perusahaan akan menurun dimata para investor dan pemerintah. Investor akan ragu menanam sahamnya di perusahaan yang melakukan manajemen laba, karena hal itu akan mengganggu investor dalam hal penanaman modal atau saham dan perspektif perusahaan dimasa depan.

Penelitian Jannah dan Mildawati (2017) dan Dewi dan Ulupui (2014) bahwa variabel pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.  
H1: Pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

#### 2.4.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba

Penerapan *good corporate governance* yang dilakukan perusahaan tidak hanya untuk pemenuhan regulasi saja tetapi jika penerapan *good corporate governance* telah dilakukan dengan baik sehingga dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir tindak manajemen laba. Penerapan *good corporate governance* dipercaya mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya *good corporate governance* maka diharapkan tindakan manipulasi dalam berbagai bentuk dapat dihindari karena terdapat kontrol yang memadai.

Semakin rendah manajemen laba maka semakin tinggi nilai perusahaan, ini berlaku bagi perusahaan yang menerapkan praktik *good corporate governance*



degan nilai CGPI yang tinggi. Semakin besar skor dalam CGPI menunjukkan bahwa semakin baik kualitas GCG suatu perusahaan sehingga tindak manajemen laba yang dilakukan semakin kecil.

Penelitian Wuryani (2013), (Vajriyanti, Widanaputra dan Putri, 2015), (Priharta, 2018) menyimpulkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

H2: *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

#### 2.4.3. Pengaruh *Leverage* terhadap ManajemenLaba

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba, karena perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi berarti memiliki proporsi utang lebih besar dibandingkan dengan aktivasnya, dan hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut tidak baik. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan terlihat baik. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi juga tingkat manajemen laba.

Penelitian Guna dan Herawaty (2010), Utari dan Sari (2016), dan (Priharta, Rahayu, dan Sutrisno, 2018) menyimpulkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba